

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu mekanisme demokrasi yang penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pilkada merupakan proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat untuk menentukan pemimpin daerah yang akan memimpin dan mengelola pemerintahan di tingkat daerah. Dalam konteks demokrasi, pemilihan umum merupakan hak politik yang harus dimiliki oleh setiap warga negara untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Pilkada yang mengandung konteks demokrasi tentu dilaksanakan secara terjadwal. Namun, dalam pelaksanaannya sering kali terjadi berbagai tantangan dan hambatan, salah satunya adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan, kurangnya sosialisasi tentang hak dan kewajiban pemilih, serta minimnya edukasi politik yang diterima oleh masyarakat.

Minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan merupakan masalah yang sering dihadapi dalam berbagai konteks politik, termasuk di Indonesia. Edukasi mengenai hak dan kewajiban pemilih serta pemahaman terhadap proses politik sangat krusial untuk menciptakan partisipasi yang bermakna dalam pemilihan umum. Suryadinata (2018) dalam

bukunya “Pendidikan Politik dan Pemilih Pemula” menegaskan bahwa tanpa adanya pemahaman yang baik tentang politik, masyarakat cenderung apatis terhadap proses pemilihan, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya partisipasi politik. Hal ini diperburuk dengan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam menyampaikan informasi dan edukasi yang memadai kepada pemilih. Sejalan dengan itu, Artikel Wibowo (2019) dalam "Jurnal Politik" juga mengindikasikan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum di Indonesia masih sangat rendah, salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih.

Kurangnya sosialisasi dan edukasi politik yang diterima oleh masyarakat menjadi faktor utama yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dalam pemilihan. Dengan kata lain, tingkat efektivitas sosialisasi mengenai proses pemilihan dan pentingnya partisipasi politik belum sepenuhnya tercapai. Suryadinata (2018) mengemukakan bahwa penyebab kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses politik berawal dari tidak teredukasinya pemilih pemula mengenai mekanisme dan pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum. Dalam studi lainnya, Wibowo (2019) menambahkan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan politik di kalangan masyarakat disebabkan oleh kurangnya program edukasi politik yang berkesinambungan dan komprehensif.

Dari berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan dalam sosialisasi dan edukasi politik dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan, termasuk penyampaian

informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai hak dan kewajiban pemilih serta pentingnya keterlibatan dalam proses politik.

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan merupakan salah satu masalah utama lainnya yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Pemahaman yang kurang ini sering kali berakar dari rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Menurut Solihah (2018), banyak pemilih yang tidak menyadari bahwa partisipasi mereka dalam pemilihan merupakan tanggung jawab moral dan legal untuk menentukan arah masa depan daerah. Dalam penelitian yang sama, Anugrah (2018) mengungkapkan bahwa pemahaman yang minim ini juga dapat disebabkan oleh tidak meratanya informasi mengenai manfaat partisipasi dalam pemilihan bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa rendahnya pemahaman ini merupakan faktor krusial yang menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilihan.

Lemahnya sosialisasi tentang hak dan kewajiban pemilih juga menjadi penyebab rendahnya partisipasi dalam pemilihan. Sosialisasi yang kurang efektif dari pihak penyelenggara pemilu serta minimnya program-program edukasi politik yang intensif dan berkesinambungan berdampak pada kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam demokrasi. Solihah (2018) menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab adalah rendahnya intensitas dan cakupan sosialisasi politik yang dijalankan. Selain itu, Anugrah (2018) menyoroti kurangnya konten edukatif yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Untuk itu, penting kiranya untuk

menekankan peningkatan sosialisasi yang komprehensif dan inklusif untuk memastikan setiap lapisan masyarakat mendapat pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Pilkada. Karena itu, peningkatan dalam program sosialisasi dan edukasi politik sangat diperlukan guna meningkatkan partisipasi publik secara efektif dan berkelanjutan.

Sejumlah peneliti telah menelusuri berbagai studi sebelumnya tentang sosialisasi pendidikan pemilih terhadap partisipasi masyarakat dalam pilkada. Hasil penelusuran tersebut mengungkapkan bahwa beberapa penelitian memberikan pandangan yang beragam mengenai pentingnya edukasi pemilih dalam meningkatkan partisipasi pemilu. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh AD Irawan dari JHR (Jurnal Hukum Replik) pada tahun 2020 menyoroti bahwa rendahnya partisipasi pemilih sering kali disebabkan oleh minimnya informasi yang diterima masyarakat mengenai hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih. Penelitian tersebut menekankan perlunya skema pendidikan pemilih yang lebih intensif dan terstruktur untuk mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh FL Gurning dan M Simangunsong dari *Journal of Teaching* pada tahun 2023 juga mendukung temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pendidikan politik yang efektif dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesadaran politik masyarakat. Laporan dari LMA Sa'ban dan Nastia dari Jurnal Pengabdian tahun 2022 juga menyoroti bahwa kurangnya sosialisasi yang komprehensif menjadi hambatan utama dalam partisipasi pemilih yang optimal. Penelitian yang dilakukan oleh MHSMH Siregar dari Yudabbiru: Jurnal Administrasi Negara tahun 2022

menambahkan bahwa pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan dalam sosialisasi hak dan kewajiban pemilih sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah menggali tema yang serupa, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berbeda dengan fokus pada pendekatan strategis yang lebih mendalam dan berorientasi pada kebijakan untuk meningkatkan edukasi politik sebagai solusi jangka panjang terhadap masalah minimnya partisipasi pemilih dalam pilkada 2024.

Berkaca pada data yang dipaparkan oleh Pemprov Jatim dan Kominfo Jatim yang menjelaskan partisipan masyarakat dalam proses pemilihan umum di Jawa Timur menempati urutan ke 20 dari total 29 kabupaten dan 9 kota yang ada di Jawa Timur. Kabupaten Nganjuk memiliki rata-rata 83.99% yang dalam taraf peringkat masih tergolong rendah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyelenggara pemilu harus memiliki strategi untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 dapat meningkat. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “Sosialisasi Pendidikan Pemilih pada PILKADA Kabupaten Nganjuk Tahun 2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, terdapat pokok-pokok permasalahan yang merupakan sentral pembahasan dan peneliti akan mengkaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memberikan pendidikan pemilih pada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pada Pilkada Nganjuk 2024?
2. Bagaimana strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilkada Nganjuk 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum.(KPU) dalam memberikan pendidikan pemilih pada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pada Pilkada Nganjuk 2024
2. Untuk mengetahui strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilkada Nganjuk 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak yang lain:

1. Manfaat Teoritis

Adapun kegunaan teoritis yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang komunikasi dalam menyampaikan informasi pada masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi atau rujukan kepada para peneliti selanjutnya yang sedang menempuh studi strata satu.
- c. Sebagai bahan atau wacana bagi pemerhati politik dan permasalahan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum.

2. Manfaat praktis

- a. Menjadi rujukan penyelenggara pemilu terkhusus pada KPU dapat menjalin komunikasi kepada pemilih.
- b. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran yang dijadikan sebagai pertimbangan KPU dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris.

Langkah penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti bersifat penelitian lapangan (*field research*) dengan mencari fakta dari lapangan untuk mengamati peristiwa politik dalam suatu keadaan alamiah. Membuat catatan lapangan secara ekstensif kemudian dibuatkan analisis. Dalam penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana data yang nantinya terkumpul yaitu berupa data dari hasil observasi, wawancara, dan juga dokumentasi yang digunakan sebagai pendukung.

1.5.2 Prosedur Penelitian

Penelitian atau riset adalah aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan bertujuan. Prosedur atau langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, secara garis besar dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang mengacu pada pendapat Moleong (2007:126) menjelaskan bahwa “Tahapan penelitian kualitatif menyajikan 3 tahapan yaitu *pertama*, tahap pra lapangan. *Kedua*, tahap pekerjaan lapangan. *Ketiga*, tahapan analisis data”. Adapun uraian dari ketiga tahapan yang telah disebutkan sebagaimana berikut:

1. Tahap pra lapangan

Tahap Pra-lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum pengumpulan data. Tahapan ini diawali dengan penjajakan lapangan untuk menentukan permasalahan atau fokus penelitian. Tahapan ini secara rinci meliputi: menyusun rancangan lapangan, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan

menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan penelitian, persoalan etika penelitian.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Pekerjaan Lapangan Tahap pekerjaan lapangan merupakan kegiatan peneliti yang dilakukan ditempat penelitian. Pada tahapan pelaksanaan ini, peneliti mengumpulkan data sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

3. Tahap analisis data

Pada tahap ini dibahas prinsip pokok dalam analisis data, prinsip tersebut meliputi dasar, menemukan tema dan merumuskan permasalahan. Semua data-data yang telah diperoleh dari lapangan dan dikumpulkan selama penelitian berlangsung, sebelum melakukan analisis peneliti akan menguji kredibilitas datanya terlebih dahulu.

Menurut Nasution yang dikutip oleh Suwarma mengatakan bahwa lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi. Adapun Lokasi yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten Nganjuk.

1.5.3 Partisipan Penelitian

Partisipan peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, dalam penelitian kualitatif partisipan peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Peneliti akan terjun ke lapangan

sendiri dalam pengumpulan data, baik pada *grand tour question*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih terhadap Partisipan Masyarakat dalam Pilkada Tahun 2024.

1.5.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengkajian data. Teknik pengumpulan data digunakan secara eksklusif agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel, yakni sebagai berikut:

1.5.4.1 Wawancara Mendalam (*in depth interview*)

Wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Wawancara mendalam umumnya mengumpulkan informasi untuk tujuan penelitian melalui sesi tanya jawab dalam percakapan tatap muka antara pewawancara dan informan atau responden. Adapun pihak yang terkait dalam wawancara ini adalah Komisioner dan Anggota KPU Kabupaten Nganjuk.

1.5.4.2 Observasi

Observasi merupakan metode penelitian yang penting untuk memahami dan memperkaya pengetahuan tentang fenomena yang diteliti. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas

yang ingin diteliti. Peneliti dapat terjun langsung menjadi partisipan dalam pengumpulan data atau menjadi nonpartisipan yang hanya mengamati.

1.5.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, buku, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berwujud laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

1.5.5 Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun analisis data yang dilakukan oleh peneliti dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, maka peneliti perlu melakukan analisis data melalui reduksi data. Dalam proses reduksi data peneliti akan memilah, memfokuskan, menyederhanakan atau merubah data yang ditemukan dilapangan

berdasarkan catatan lapangan, hasil wawancara, dokumen, dan fakta yang ada di lapangan mengenai Sosialisasi Pendidikan Pemilih terhadap Partisipan Masyarakat dalam Pilkada Tahun 2024.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan peneliti untuk memahami masalah dan pengambilan langkah selanjutnya. Penyajian data adalah kumpulan informasi yang dibatasi untuk memungkinkan penarikan kesimpulan. Setelah mengumpulkan data terkait partisipan masyarakat dalam pilkada tahun 2024, selanjutnya peneliti mengelompokkan hasil observasi dan wawancara untuk disajikan dan dibahas lebih detail.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing / Verification*)

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah terlaksananya proses reduksi data dan penyajian data. Pada proses penarikan kesimpulan ini, artinya data telah dipilih berdasarkan fokus penelitian dan kebutuhan peneliti yang dirangkai secara sistematis.